

175

Dialektika Struktur dan Kultur dalam Proses Pembaharuan Politik Orde Baru

H. Anton DJAWAMAKU*

SUATU KRITIK ATAS TEORI-TEORI POLITIK

Politik adalah gejala yang amat menyangkut manusia. Manusia disebut "Zoon politikon" karena kodratnya ia selalu hidup bermasyarakat. Tampaknya sejak dahulu manusia selalu mengkaji politik. Hal itu tampak dalam pemikiran-pemikiran Yunani sejak sebelum Plato, Romawi dan pemikiran Barat umumnya. Di dunia Timur pemikiran-pemikiran mengenai politik antara lain telah tampak dalam kebudayaan India kuno, Cina dan di Indonesia dapat disimak misalnya saja dalam buku Negara Kertagama, Pararaton, Babad Tanah Jawi, dan sebagainya.

Di samping itu bisa diandaikan bahwa para aktor politik seperti raja, ksatria, monarki, sosialis dan komunis selalu berpikir terus mengenai politik. Oleh karena itu tidak mengherankan berkembangnya teori-teori politik baik yang bersifat akademis maupun praktis. Marx misalnya mengemukakan pemikiran bahwa: "berteori adalah untuk mengubah dunia, bukan hanya mengubah pengertian tentang dunia. Pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh Lenin, Stalin, Mao dan mempengaruhi perkembangan pemikiran-pemikiran, baik yang bersifat Marxis maupun non-Marxis.

Dewasa ini manusia masih tetap disibukkan pula dengan teori-teori politik. Hal ini tampak dalam perkembangan aliran pemikiran Evolusionisme, Revolusionisme, pemikiran Strukturalis, Fungsionalis dan Idealis. Bahkan agama pun dijadikan sumber dan pangkalan dari ideologi-ideologi politik. Pada dasarnya teori-teori itu berusaha untuk mewujudkan masyarakat manusia yang sempurna. Walaupun demikian tampaknya belum ada teori politik yang betul-betul memuaskan. Bahkan situasi teori-teori politik yang ada saling berbeda dan bertentangan, baik di dalam teori itu sendiri maupun

*Staf CSIS.

antara teori yang satu dan lainnya. Teori liberal diperlawankan dengan teori totaliter; teori Evolucionisme diperlawankan dengan teori Revolusionisme, teori Utopianisme diperlawankan dengan teori realisme, teori keagamaan diperlawankan dengan teori Sekularisme.

Kenyataan-kenyataan itu merupakan problematik dan mendorong lahirnya teori tentang teori-teori politik itu sendiri. Dengan demikian orang didorong untuk mengembangkan pemikiran mengenai teori tentang teori-teori politik.¹ Hal ini merupakan manifestasi situasi kritis yang dihadapi. Orang mau mengadakan penilaian, mengapa terjadi perbedaan dan bahkan pertentangan antara teori-teori politik yang ada dan mengapa semua teori-teori itu selalu tidak memuaskan? Dan mengapa tak ada teori-teori yang sempurna?

Kesalahan terbesar dari teori-teori yang berkembang sampai sekarang ini adalah: melepaskan politik dari induknya yaitu manusia. Inilah kesalahan yang dilakukan oleh Machiavelli dan Machiavellisme. Sebagaimana dikemukakan oleh Cassirer: "Seluruh argumentasi Machiavelli adalah jelas dan terpadu. Logikanya begitu sempurna. Kalau kita menerima premisa-premisanya kita tak dapat menghindari kesimpulan-kesimpulannya. Dengan Machiavelli kita berdiri pada pintu gerbang dunia modern. Keinginan berakhirnya dengan tercapainya Negara memiliki otonomi sepenuhnya. Hal ini membawa akibat yang paling disukai. Negara sepenuhnya bebas: tetapi pada saat yang sama menjadi terasing secara lengkap. Pisau analisa pemikiran Machiavellis telah memotong semua benang yang mana generasi-generasi pembentuk negara telah mengikatkan kepada seluruh organ eksistensi manusia. Dunia politik telah kehilangan hubungannya tidak hanya dengan agama atau metafisika, tetapi juga dengan semua bentuk-bentuk etik manusia dan kehidupan budaya."²

Menurut Prof. Drijarkara, negara janganlah dipandang sebagai batu yang tetap tidak berubah (itu pandangan statis). Negara adalah kehidupan, jadi aksi, gerak. Agar supaya pandangan kita dinamis, kesampingkanlah sebentar istilah-istilah yang biasa, seperti: bernegara, mempunyai negara dan sebagainya. Sebab semua itu membayangkan seolah-olah negara itu adalah sesuatu, yang berdiri sendiri di luar perbuatan manusia, yang terus-menerus? Manusia itu tidak bernegara, melainkan menegara! Ia menegarakan diri sendiri dan sesama manusia dan tanahnya dengan seluruh keadaannya.³ Apa yang di-

¹Sebuah contoh mengenai usaha seperti ini dilakukan oleh A.M.W. Pranarka, *Sejarah Perkembangan Pemikiran tentang Pancasila Sebagai Ideologi Dasar Negara dan Sumber Hukum*. Disertasi untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum yang dipertahankan dalam Rapat Senat Guru Besar Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada tanggal 28 April 1984.

²Ernst Cassirer, *The Problem of Knowledge*, New Haven: Yale University Press, 1978, hal. 76.

³Prof. Dr. N. Drijarkara S.J., "Kehidupan Negara" dalam Kumpulan Karangan Almarhum Prof. Dr. N. Drijarkara (tanpa tahun), hal. 115.

ungkapkan oleh Prof. Drijarkara itu memang dapat diterapkan pada kenyataan kehidupan politik. Dari sejarah perkembangan negara dan politik semakin terasa perlunya menempatkan perpolitikan dalam kubu kemanusiaan.

Politik selalu menggejala, menjadi konkrit, mewujud dalam sejarah, akan selalu mewujudkan diri dalam rangka proses perkembangan manusia. Manusia adalah inti utama dari segala realita politik. Dengan mendasarkan diri pada manusia sebagai titik inti, maka kita akan lebih dapat memahami mengapa realita politik itu begitu kompleks, mengapa realita politik selalu berkembang, berubah, mengapa realita politik membawa berbagai ketegangan-ketegangan, meminta kemajuan-kemajuan. Adalah suatu keharusan bahwa perkembangan politik meminta adanya pandangan dasar tentang manusia, adanya satu antropologi.

Jadi tragedi dari usaha Machiavelli dan usaha-usaha modern dalam hal memandang negara adalah bahwa negara dan perpolitikan dilepaskan dari titik pangkalnya yang utama: ialah manusia. Pemikiran yang demikian itu sekurang-kurangnya menyangkut dua hal:

1. Kemustahilan (absurditas) cita-cita membangun masyarakat yang sempurna. Politik sebagai fenomena manusia tentu tidak sempurna. Karena manusia tetap makhluk yang tidak sempurna, sekalipun selalu berusaha untuk menjadi sempurna. Seluruh kegiatan manusia adalah gabungan dari dinamika dan keterbatasan. Teori-teori politik yang berusaha mewujudkan masyarakat sempurna pada dasarnya berarti mengabaikan sifat, hakikat, kodrat manusia, inti utama dari segala realita politik. Pemikiran yang demikian itu adalah utopianisme dan oleh karena itu absurditas. Masalahnya adalah bagaimana manusia dan seluruh masyarakat dapat hidup mengembangkan diri dalam situasi politik yang memiliki keterbatasan-keterbatasan. Dalam hal ini eksistensi manusia harus menjadi landasan yang obyektif dan dinamis dari pengembangan teori-teori politik.
2. Kesepihakan (Pars-pro-totoisme). Yaitu anggapan bahwa bagian dari manusia seolah-olah seluruh manusia. Akibatnya timbul teori-teori yang deterministik, yang memutlakkan salah satu aspek saja. Misalnya kita mengenal Determinisme Ekonomi, Determinisme Psikologi, Determinisme Pemikiran, Determinisme Keturunan, Determinisme Ras dan sebagainya.

Dengan demikian maka teori tentang teori-teori politik akhirnya harus menyadari bahwa titik tolak dari politik adalah manusia. Manusia yang selalu berada di dalam proses mengembangkan diri, membangun dirinya terus-menerus. Manusia adalah yang mempunyai dinamika, manusia adalah yang berpolitik, oleh karena itu manusia harus menjadi sumber dikembangkannya teori-teori politik.

DIALEKTIKA STRUKTUR DAN KULTUR

Kita berpijak pada kenyataan bahwa manusia adalah inti utama dari segala realita politik. Maka titik tolak obyektif dari masalah pembangunan politik adalah manusia, dengan tujuan akhir manusia pula. Manusia adalah sangkan-paran politik. Dengan meminjam vokabuler Aristoteles, bisa dikatakan bahwa manusia adalah causa efficien dan serta-merta juga causa finalis di dalam pembangunan politik. Dengan demikian usaha-usaha pembangunan politik harus didasarkan atas pemahaman kita mengenai manusia itu.

Pertama, bahwa hidup dan perkembangan manusia adalah dinamis dan evolutif.¹ Artinya manusia selalu berusaha memberi jawaban terhadap tuntutan-tuntutan situasi, sehingga memungkinkan setiap manusia bersama-sama mengembangkan hidupnya selaras dengan martabat kemanusiaan. Atas dasar itu, maka politik sebagai bagian dari hidup dan perkembangan manusia juga mempunyai ciri yang dinamis dan evolutif. *Kedua*, bahwa manusia selalu mengalami ketegangan eksistensial dalam dirinya, yaitu ketegangan antara dinamika dan keterbatasan; antara kebhinnekaan dan ketunggalikaan; antara eksternalisasi dan internalisasi; antara egoisme dan altruisme; antara spiritual dan material; antara introvetisme dan ekstrovetisme; antara kuantitatif dan kualitatif; antara individu dan sosial; antara inovasi dan konservatif.²

Oleh karena itu hidup manusia menjadi sangat kompleks dan dinamis. Kompleksitas keadaan yang dihadapi manusia ini selalu diwarnai pula oleh faktor ketidakpastian. Sementara itu manusia harus tetap dinamis agar dapat mempertahankan kelangsungan eksistensi dan berupaya meningkatkan martabat kemanusiaan. Jadi manusia harus membuat pilihan-pilihan dalam situasi yang serba kompleks, serba tidak pasti, bahkan mungkin dalam situasi kebingungan. Pilihan-pilihan itu berlangsung dalam proses dialektis yang tak ada habisnya, terus-menerus menyesuaikan diri, menyusun kembali, memberi

¹Evolusi yang diartikan di sini tidak sebagai doktrin, melainkan sebagai fakta. Sejarah pengetahuan menunjukkan bahwa segala jenis pengetahuan manusia sifatnya evolutif. Lihat A.M.W. Pranarka, *op. cit.*, hal. 397-404.

²Presiden Soeharto ketika menerima para perwira senior ABRI di Tapos-Bogor tanggal 17 Juli 1983 menerangkan ketegangan eksistensial ini dengan menguraikan butir-butir mutiara warisan budaya bangsa Indonesia, yaitu ilmu "kasunyatan" (melihat kenyataan dengan panca-inder, perasaan dan rasio), "Sangkan paraning dumadi" (dari mana dan ke mana manusia itu), serta "kasampurnaning urip" (hidup bahagia di dunia dan akhirat). Ia juga menerangkan falsafah yang terkandung di dalam kata-kata: "Ha na ca ra ka, da ta sa wa la, dan pa da ja ya nya." Manusia diciptakan oleh Penciptanya lengkap dengan cipta, rasa, karsa, panca-inder serta sifat-sifat baik dan buruk, *Antara*, 18 Juli 1983. Lihat juga Soedjono Hoemardani, *Suatu Ajaran tentang Hidup Manusia dan Hubungannya dengan Tuhan yang Digali dari Kedalaman Makna Huruf Jawa*, Jakarta, 1981. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa pengalaman tegangan hidup dan kehidupan itu sudah menjadi salah satu unsur ajaran di dalam kebudayaan kita.

wujud baru kepada apa yang telah diperoleh. Dengan perkataan lain hidup manusia pada dasarnya merupakan dialektika antara struktur dan kultur.¹ Dalam proses itulah manusia terus-menerus berusaha merealisasikan dirinya, baik dalam kehidupan masing-masing manusia (individual) maupun dalam kehidupan bersama sesamanya (kolektif).

Kehidupan politik sebagai bagian dari kehidupan manusia juga merupakan dialektika antara struktur dan kultur. Jadi sistem politik akan merupakan ketegangan terus-menerus antara struktur dan kultur politik. Hal ini dapat berkembang ke arah yang positif, kreatif dan konstruktif, tetapi juga sebaliknya dapat menjurus ke arah yang kurang menguntungkan bahkan menghancurkan. Perkembangan yang kurang sehat, misalnya tercipta suasana iuxtapositif antara aspek struktur dan aspek kultur. Dalam keadaan ini perkembangan masyarakat menghendaki sesuatu yang baru, yang lebih baik, akan tetapi keadaannya tidak menentu. Situasi konflik terjadi secara mendalam apabila terjadi suasana opositif antara aspek struktur dan aspek kultur. Suatu perkembangan yang baik adalah apabila terdapat pola asosiatif antara aspek struktur dan aspek kultur. Di sini terdapat suatu sintesa kreatif. Oleh karena itu interaksi dan interelasi antara struktur dan kultur politik harus dikembangkan sedemikian rupa agar selalu menjadi faktor yang konstruktif bagi perkembangan manusia, bukan sebaliknya.

Dengan konsep di atas sebenarnya kita harus berusaha untuk menjauhkan aspirasi-aspirasi dan teori-teori politik yang utopianistik. Sebab aspirasi dan teori yang demikian itu, di samping mengingkari keterbatasan manusia sekaligus juga menempatkan manusia di luar konteks politik. Akibatnya manusia yang merupakan subyek politik ini selalu merasa tidak puas, bahkan terasing dari teori-teori maupun kenyataan politik. Politik bukanlah sesuatu di luar subyeknya, melainkan sesuatu yang harus diciptakan dan dikerjakan oleh dan demi subyek politik itu sendiri: yaitu manusia. Di samping itu, dengan konsep di atas kita juga berusaha untuk menjauhkan aspirasi-aspirasi dan teori-teori yang bersifat deterministik mengenai politik dan pembangunan politik. Sebab aspirasi dan teori yang demikian ini pada dasarnya mengkotak-kotakkan manusia dalam kesempitan-kesempitan berpikir. Akibatnya manusia dijerat dan dipecah-pecah dalam sistem-sistem dan berbagai sub-sistem. Hal ini yang secara fundamental bertentangan dengan pemikiran untuk membangun manusia seutuhnya secara realistik eksistensial.

Oleh karena itu pembangunan politik yang selalu mengandung dialektika antara struktur dan kultur, dengan menempatkan manusia inti utama dari se-

¹Mengenai dialektika struktur dan kultur ini antara lain lihat C.A. van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, diindonesiakan oleh Dick Hartoko (Penerbit Kanisius Yogyakarta dan BPK Gunung Mulia, Jakarta), 1976.

gala realita politik, menjadi penting sekali. Aktualisasi kultur selalu melalui struktur. Relevansi dari struktur adalah kalau ia merupakan fungsi bagi kultur. Suatu saat pembangunan politik mungkin lebih menekankan struktur, tetapi tidak boleh mengabaikan kultur; sebaliknya di waktu lain mungkin akan lebih menekankan aspek kultur, tetapi tanpa mengabaikan sama sekali segi struktur. Memutlakkan kultur yang akhirnya sampai pada keinginan untuk merombak struktur demi struktur, membawa manusia kepada absurditas. Menekankan pada aspek struktur tanpa memberi perhatian kepada segi kultur, tiada lain adalah mekanisme yang totaliter. Apabila struktur dan kultur tidak berfungsi secara dinamis, maka situasi politik akan mengalami kejenuhan dan berkembang menjadi tidak sehat.

Karena hal ini, dialektika struktur dan kultur politik merupakan bagian dari kehidupan dan perkembangan manusia, bisa berkembang destruktif, bisa konstruktif. Pembangunan politik ditujukan untuk menciptakan struktur dan kultur yang konstruktif, yang berlangsung lewat suatu proses dialektis yang tak habisnya, terus-menerus menyesuaikan diri, menyusun kembali, memberi wujud baru kepada apa yang telah diperoleh. Secara demikian berarti kesalingtergantungan (interdependensi) struktur dan kultur, keseimbangan pengembangan struktur dan kultur, yang harus mampu memberi jawaban secara positif terhadap tuntutan-tuntutan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah berkembang maju.

Dalam berbagai upaya merintis jalan menuju tata dunia baru hingga kini, ada sementara pengamat yang melihat bahwa pendekatan-pendekatan yang dilakukan masih hanya ditekankan pada aspek struktur dan belum pada aspek kultur; sebaliknya ada yang lebih menekankan pada aspek kultur. Walaupun sementara itu telah mulai berkembang ideologi tentang kultur yang manusiawi, tetapi hal ini tidak akan berarti kalau tidak diaktualisasikan melalui struktur. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan selama ini dalam bidang politik, misalnya *détente*, ekonomi, perdagangan, keuangan dan teknologi, masih bersifat akomodasi taktis demi menghindari terlibatnya kekuatan-kekuatan besar dari konflik yang semakin serius dan mendalam.¹ Jadi dalam pembangunan tata dunia baru pun, aspek struktur dan kultur masih harus dikembangkan sejalan secara kreatif sehingga antara keduanya terdapat keterkaitan yang saling menunjang secara positif.

PEMBAHARUAN POLITIK DALAM ORDE BARU

Konsep dialektika struktur dan kultur tampaknya bisa digunakan untuk memahami pembangunan dan perubahan politik dalam era Orde Baru. Salah

¹Lihat A.M.W. Pranarka, "Merintis Jalan Menuju Tata Dunia yang Lebih Manusiawi," *Suara Karya*, 20 Januari 1976.

satu aspirasi yang terus-menerus didengungkan pada awal Orde Baru adalah tuntutan pembaharuan di dalam tata kehidupan negara kita, khususnya adalah pembaharuan bahkan perombakan struktur politik. Aspirasi ini ditampung oleh Orde Baru menjadi cita-cita perjuangan yang terus diusahakan pelaksanaannya secara operasional hingga hari ini. Cita-cita Orde Baru itu pada hakikatnya adalah pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen, pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dan pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila secara terencana.

Perombakan struktur politik dalam Orde Baru bukanlah aspirasi untuk sekedar perombakan, akan tetapi aspirasi yang ada konsepsi dan tatanannya. Kalau aspirasi politik dapat dipandang sebagai kultur, maka harus diaktualisasi melalui struktur. Struktur yang dimaksudkan itu tiada lain adalah konstitusi UUD 1945 yang harus menjadi tatanan dari perombakan struktur. Dengan demikian perombakan struktur politik harus dilakukan secara konstitusional, sesuai dengan isi dan jiwa konstitusi. Hal ini telah ditegaskan oleh Presiden Soeharto sejak awal Orde Baru dan ia mulai dengan mengambil langkah-langkah konkrit mengenai hal itu.¹

Apabila kita mempelajari keseluruhan naskah konstitusi UUD 1945, ternyata ditegaskan dalam konstitusi itu bahwa yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perorangan, Undang-Undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek.² Pentingnya semangat ini menunjukkan aspek kultur. Kultur itu tiada lain adalah Pancasila, kebudayaan bangsa.

Ini semua berarti bahwa pembangunan politik, perubahan politik di dalam Orde Baru harus menempuh jalan dialektika antara struktur dan kultur. Oleh karena itu perlu pembangunan struktur politik maupun kultur politik yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Yang dikehendaki dari pembangunan ini adalah tumbuhnya sikap baru, cara berpikir dan cara kerja baru di dalam politik. Terwujudnya cara kerja baru di dalam lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat. Jadi pembaharuan politik ini berarti pembaharuan di dalam pemikiran politik, sikap politik, tingkah laku politik, baik di dalam kultur maupun struktur politik.

Dialektika struktur dan kultur politik mewujudkan sistem politik yang berlangsung terus-menerus. Kehidupan politik adalah manifestasi kultur po-

¹Lihat Pidato Pejabat Presiden Republik Indonesia Jenderal Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1967.

²Lihat Penjelasan UUD 1945.

litik dan dalam hal ini struktur politik merupakan "mesin" kehidupan politik. Dengan demikian kehidupan politik yang sehat juga ditentukan oleh berfungsinya struktur politik yang mendukungnya. Berbicara mengenai struktur politik, perlu dibedakan antara struktur politik dalam suasana pemerintahan dan struktur politik dalam suasana masyarakat. Struktur politik dalam suasana masyarakat sering disebut infrastruktur politik. Sedangkan struktur politik dalam suasana pemerintahan sering disebut suprastruktur politik. Interaksi dan komunikasi antara infrastruktur politik dan suprastruktur politik menghasilkan proses (kehidupan) politik yang dapat diuraikan menurut pola "input-output."¹

Yang termasuk infrastruktur politik di antaranya adalah komponen-komponen partai-partai politik, organisasi-organisasi massa, kelompok-kelompok kepentingan, kelompok desak (pressure group) dan media komunikasi massa. Juga termasuk dalam kategori infrastruktur politik adalah bentuk-bentuk struktural lainnya, baik yang melembaga maupun yang kurang melembaga, sepanjang berpengaruh terhadap kehidupan (sistem) politik. Sedangkan yang termasuk suprastruktur politik adalah lembaga-lembaga kenegaraan yang legal formal, yaitu lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif dan administratif. Lembaga-lembaga kenegaraan ini dalam UUD 1945 dapat dibedakan antara Lembaga Tertinggi Negara yaitu MPR dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara yaitu Presiden, DPR, Mahkamah Agung, DPA dan BPK.

Kehidupan politik dalam suasana masyarakat yang didukung oleh infrastruktur politik menjalankan fungsi-fungsi input bagi suprastruktur politik. Yaitu bahwa infrastruktur politik senantiasa mempengaruhi, bahkan mungkin menentukan lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Fungsi-fungsi input itu antara lain berupa dukungan masyarakat (social support) dan partisipasi masyarakat (social participation). Hal ini dapat diperinci ke dalam fungsi-fungsi pendidikan politik (political socialization), pengajuan kepentingan (interest articulation), pemaduan kepentingan (interest aggregation) dan komunikasi politik yang berlangsung di dalam setiap unsur dari struktur politik.

Sebaliknya suprastruktur politik menjalankan fungsi-fungsi output, pada gilirannya mempengaruhi pula infrastruktur politik dalam menjalankan fungsinya. Fungsi-fungsi output antara lain berupa pengambilan dan pelaksanaan keputusan. Hal ini dapat diperinci ke dalam fungsi-fungsi pengambilan keputusan (decision atau rule-making) yang dijalankan oleh lembaga-

¹Lihat Sumiskum, "Struktur Politik di Indonesia (Permasalahannya)," *Analisa*, 1.02-1, CSIS (Oktober 1971), hal. 4-6. Lihat juga David Easton, *A Framework for Political Analysis* (Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.Y.: 1965), hal. 47-133.

lembaga legislatif; pelaksanaan keputusan (rule application) yang dijalankan oleh lembaga eksekutif dan administratif, dan fungsi-fungsi pelaksanaan keputusan (rule adjudication) yang dikerjakan oleh lembaga yudikatif. Apa yang dihasilkan oleh suprastruktur politik sebagai output itu dikembalikan lagi kepada infrastruktur politik sebagai umpan balik (feedback), selanjutnya diolah oleh infrastruktur menjadi input bagi suprastruktur lagi, demikian seterusnya.

Persoalan selanjutnya adalah bagaimana pendekatan yang harus dilakukan di dalam menata kembali struktur dan kultur politik di dalam Negara Republik Indonesia? Telah dikemukakan bahwa paham negara yang dianut oleh UUD 1945 adalah negara kesatuan kebangsaan dan kesatuan kemanusiaan dengan orientasi kepada keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Dalam Penjelasan UUD 1945 dikatakan bahwa aliran pengertian negara persatuan, negara yang meliputi dan melindungi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Pandangan ini oleh Soepomo disebut aliran pikiran (Staatsidee) negara yang integralistik, yang sesuai dengan keistimewaan dan corak masyarakat Indonesia.¹ Dengan demikian pendekatan yang harus dilakukan dalam pembaharuan kehidupan politik adalah pendekatan integralistik inilah. Sebab dengan pendekatan ini kita memandang segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam satu wawasan: wawasan nasional.

Melalui pendekatan integralistik itu, Negara Bangsa dijiwai oleh kultur yang sama. Kultur yang senantiasa membuka diri untuk berkomunikasi, kultur yang selalu berikhtiar mewujudkan keserasian, kultur yang selalu menjunjung tinggi kedamaian. Apabila sub-sub kultur menjadi deterministik, maka akan terjadi konflik di dalam kultur. Sebaliknya apabila sub-sub struktur menjadi deterministik, maka konflik struktur pun sulit dihindari. Masalahnya adalah bagaimana menciptakan keseimbangan tidak hanya antara struktur dan kultur, tetapi juga di antara berbagai elemen di dalam struktur dan kultur itu masing-masing. Inilah permasalahan politik yang tampaknya masih harus digeluti terus-menerus selama Orde Baru.

ESENSI PEMBAHARUAN POLITIK ORDE BARU

Pembaharuan kehidupan politik merupakan salah satu cita-cita yang amat jelas pada awal Orde Baru. Terutama pada tahun-tahun 1967, 1968, 1969, timbulah pemikiran-pemikiran yang aspirasi dasarnya adalah perombakan struktur politik. Esensi dari pembaharuan politik yang dicita-citakan itu tampak-

¹Muh. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I (Penerbit Yayasan Prapanca: 1969), hal. 113.

nya menemukan salah satu perumusan di dalam Seminar Sosial Landasan Perombakan Struktur Politik yang diselenggarakan di Bandung dari tanggal 1-2 Nopember 1968, yaitu saat awal permulaan Orde Baru.¹ Kesimpulan seminar ini tampaknya tetap mempunyai relevansi untuk disalami, terutama hal-hal yang mengenai pola politik lama, pola politik baru dan peranan agama yang tampaknya pada waktu itu merupakan persoalan politik yang urgen pula. Uraian berikut akan menyetengahkan pemikiran-pemikiran yang disimpulkan oleh Seminar Bandung tersebut, yang berkenaan dengan gagasan perombakan struktur politik.

Mengenai Pola Politik Lama

Oleh karena pada waktu itu timbul persoalan mengenai apakah perbedaan antara pola politik lama dan pola politik baru, maka dirumuskan landasan mengapa perlu ada perombakan struktur politik dan landasan ke mana tata kehidupan politik harus dibina. Seminar Bandung tanggal 1-2 Nopember 1968 itu mengatakan bahwa kita perlu merumuskan perbedaan antara pola politik lama yang harus ditinggalkan dan pola politik baru yang harus dibina dan diperjuangkan.

Kesimpulan seminar ini menegaskan bahwa pola politik lama adalah suatu pola yang didasarkan pada "machtsvorming" dan "machtsaanwending" sebagai tujuan. Politik pada hakikatnya adalah kekuatan dan kekuasaan, sehingga kehidupan politik tidak berarti lain kecuali usaha-usaha ke arah kekuasaan dan kekuatan, yang selanjutnya menghasilkan struktur politik adu kekuatan, struktur penghitungan kawan-lawan, struktur yang antagonistic, yang dalam pelaksanaannya menghasilkan power-struggle, mengakibatkan ketegangan, kecurigaan, perpecahan dan tidak jarang membawa pertumpahan darah dan pembunuhan. Pola politik ini membawa hakikat politik menjadi lepas dari manusia dan masalah kemanusiaan dan justru membawa kontradiksi di dalam diri manusia.

Itulah pola sosial politik yang dituangkan di dalam struktur multi-partai dengan dasar-dasar agama atau ideologi yang berbeda-beda, yang mengakibatkan struktur pengkotakan, kompartimentasi ideologi serta konflik-konflik yang tidak menciptakan stabilisasi dan perwujudan-perwujudan pembangunan, tetapi justru menumbuhkan kehidupan kemanusiaan yang tertutup. Pola politik lama yang tidak memungkinkan perkembangan bagi setiap manusia dan lebih menyempitkan kepentingan umum, mengakibatkan terpecahnya bangsa dalam begitu banyak kotak-kotak.

¹Lihat A.M.W. Pranarka, *Menuju Satu Indonesia Baru* (Yogyakarta, 1971), hal. 21-29.

Demikianlah kesimpulan seminar tersebut mengenai pola politik lama yang harus ditinggalkan dan merumuskan aspirasi tentang pembaharuan kehidupan politik.

Pola Politik Baru

Adapun tentang pola politik baru, dikatakan sebagai berikut: Perombakan struktur politik berarti perombakan ajaran dan pelaksanaan politik lama kepada ajaran dan pelaksanaan politik baru. Telah dikemukakan bahwa manusia adalah inti utama dari segala realita politik, sehingga titik tolak obyektif pembangunan politik adalah manusia dengan tujuan terakhir manusia pula. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tuntutan pembaharuan struktur politik adalah tuntutan kemanusiaan yang hanya dapat menghayati kemanusiaannya ini di dalam pola terbuka bersama dengan manusia lain. Jadi tuntutan untuk mewujudkan politik yang diorientasikan kepada perkembangan manusia, yang memungkinkan setiap manusia mengembangkan kehidupannya selaras dengan martabat manusia bersama dengan sesamanya.

Di sinilah letaknya landasan yang membedakan pola politik lama dan pola politik baru. Pola lama menempatkan kekuatan dan kekuasaan sebagai hakikat dan tujuan politik. Pola baru menempatkan politik pada perkembangan manusia. Pola lama adalah pola kemanusiaan tertutup, pola baru adalah pola kemanusiaan terbuka. Pola baru ini kiranya membuka orientasi baru, di mana kehidupan sosial politik menjadi bersifat terbuka. Pola yang dapat merintis kegiatan-kegiatan baru yang langsung ditujukan untuk mengangkat diri manusia dan menimbulkan kekuatan-kekuatan yang mempersatukan bangsa, melangkahi kotak-kotak agama dan ideologi. Pola yang meneguhkan disiplin sosial dan tanggung jawab segenap lapisan masyarakat.

Dengan demikian pola politik baru ini juga akan meniadakan power-struggle yang memberikan pengaruh destruktif dalam masyarakat, yang merusak mekanisme demokrasi dan tidak terarah kepada kesejahteraan dan ketertiban. Di dalam pola baru ini pengabdian dijadikan masalah inti dan justru hal ini selaras dengan inti demokrasi. Sebab demokrasi adalah demi perkembangan sesempurna mungkin dari manusia sesuai dengan martabatnya. Berdasarkan pemikiran demikian maka sistem kepartaian dan pemilihan umum hanyalah alat dan sarana untuk mewujudkan pembangunan. Oleh karena itu lembaga kepartaian seyogyanya dituangkan dalam sistem terbuka; mengatasi pengkotakan dan jumlahnya yang demikian banyak, serta ditujukan kepada usaha bersama mewujudkan pembangunan.

Sesungguhnya apa yang dinamakan orientasi kepada program kesejahteraan adalah satu konsekuensi yang rasional praktis dari pengertian dasar

politik baru yang "human development oriented." Politik yang mengarah kepada pembangunan ini berarti usaha-usaha menciptakan kondisi-kondisi spiritual, sosial, ekonomis, yuridis dan kultural yang memungkinkan setiap warga negara bersama dengan sesamanya mengembangkan kemanusiaannya. Terwujudnya kondisi-kondisi tersebut tidak ditentukan oleh ideologi-ideologi golongan atau agama, melainkan oleh moral yang baik, oleh program, oleh skill dan technical know-how. Moral yang baik itu tiada lain adalah moral yang bersumber dari Pancasila, baik berupa moral perseorangan setiap warga negara, maupun berupa moral bangsa dan moral negara.

Tentang Peranan Agama

Salah satu problematik yang dihadapi pada awal Orde Baru (hingga kini problematik ini pun tampaknya belum berakhir) adalah peranan agama dalam pembaharuan kehidupan politik. Hal ini berakar pada keinginan sementara kelompok Islam untuk menjadikan agama sebagai dasar pembaharuan dan acuan normatif nasional.¹ Dalam hubungan itu kesimpulan Seminar Bandung merumuskan peranan agama sebagai berikut: Titik tolak pemikiran dan masalah pembaharuan politik yang telah diuraikan di atas, adalah juga titik tolak bagi peranan agama di dalam masyarakat. Agama diperuntukkan bagi manusia, maka agama harus memungkinkan setiap manusia ini bersama dengan sesamanya mengembangkan kehidupan kemanusiaannya selaras dengan martabat manusia. Jadi kriteria peranan agama di dalam perkembangan masyarakat terletak pada soal apakah agama dengan pelaksanaan ajarannya dapat mengembangkan kehidupan setiap manusia ini sesuai dengan martabat kemanusiaannya bersama dengan sesamanya.

Sesungguhnya struktur sosial politik lama di Indonesia telah menjerumuskan agama-agama kepada sesuatu yang justru bertentangan dengan hakikat agama itu sendiri. Dengan pola sosial politik lama agama tidak dapat menjalankan peranannya secara wajar, terutama bila agama-agama telah masuk ke dalam struktur sosial politik yang mengandung kontradiksi dan perpecahan, baik dalam kehidupan manusia itu sendiri maupun dalam kehidupannya bersama dengan sesamanya. Maka pembaharuan pola sosial politik lama menjadi perwujudan pola sosial politik baru seperti diuraikan di

¹Masalah ini telah menjadi bahan perdebatan seru dalam Sidang BPUPKI, tetapi secara formal telah berakhir dengan disahkannya Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian berkembang lagi dalam Sidang-sidang Konstituante yang dimulai pada tanggal 10 Nopember 1956, dan berakhir dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam perkembangan Orde Baru persoalan ini pun terungkap kembali, antara lain dalam Sidang-sidang MPR(S) sejak tahun 1967 dan dalam pembahasan RUU, misalnya RUU Tentang Perkawinan pada tahun 1973; maupun dalam bentuk gerakan ekstrem lainnya.

atas, juga merupakan tuntutan dari agama untuk menjalankan peranannya di dalam masyarakat secara wajar.

Pembaharuan Politik Bersifat Evolutif

Pengertian politik senantiasa berkorelasi dengan pengertian negara dan masyarakat. Politik adalah cara negara merealisasikan diri, cara negara mencapai tujuannya. Konsep negara sebagai suatu lembaga kekuasaan membawa korelasi kepada kekuasaan politik. Konsep negara sejahtera membawa korelasi pengertian politik sebagai usaha untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian maka pembaharuan politik Orde Baru, yaitu pembaharuan politik menurut Pancasila dan UUD 1945, harus dipecahkan berdasarkan pola pengertian negara dan masyarakat menurut Pancasila dan UUD 1945.

Pembaharuan politik sesuai dengan tuntutan dan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 merupakan masalah kompleks, menyangkut seluruh segi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Menyadari masalah yang tidak sederhana dan tidak mudah ini, Presiden Soeharto menegaskan bahwa pembangunan politik, pembangunan demokrasi dan pembangunan kehidupan konstitusional tidak dapat sekali jadi. Pembangunan politik merupakan bagian yang sangat sulit dari keseluruhan pembangunan bangsa!¹ Oleh karena itu dipilihlah strategi untuk merampungkan proses pembaharuan politik ini secara bertahap, secara evolutif. Pembaharuan politik yang bersifat evolutif ini merupakan salah satu esensi dari pembaharuan politik Orde Baru.

Dengan jalan evolusi - tahap demi tahap, Pemerintah Orde Baru dengan keteguhan hati menata struktur dan kultur politik nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penataan yang dilakukan bertahap itu menunjukkan perkembangan sebagai berikut: Sejak tahun 1966 hingga tahun 1968 perhatian lebih diutamakan pada aspek struktur tanpa mengabaikan aspek kultur. Selanjutnya sejak tahun 1978 hingga kini tampaknya perhatian lebih diutamakan pada aspek kultur, tanpa mengabaikan aspek struktur. Diharapkan pada akhir Pelita IV nanti pembangunan komponen struktur dan kultur telah rampung, sehingga terciptalah kerangka landasan di bidang politik bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang terus.²

Prioritas pada aspek struktur adalah pelurusan kembali tertib konstitusional berdasarkan Pancasila. Hal ini dimulai dengan Sidang Umum MPRS

¹Lihat Pidato Kenegaraan Presiden Soeharto, tanggal 16 Agustus 1980.

²Lihat hasil-hasil Sidang Umum (SU) MPRS/1966, Sidang Istimewa MPRS/1967, SU-MPRS/1968, SU-MPR/1973, SU-MPR/1978 dan SU-MPR/1983. Lihat juga Ali Moertopo, *Strategi Pembangunan Nasional*, CSIS, September 1981.

1966, hasil-hasilnya semakin dimantapkan dalam Sidang Istimewa MPRS 1967 dan Sidang Umum MPRS 1968. Sidang-sidang Umum MPR kemudian merupakan pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya lembaga-lembaga negara: Presiden, DPR, BPK, DPA dan MA telah dikembalikan pada kedudukan, fungsi dan aturan permainan sesuai dengan UUD 1945. Dengan berfungsinya DPR ini maka pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam APBN, sesuai dengan perintah konstitusional selalu ditetapkan dalam bentuk undang-undang. Praktek konstitusi juga semakin diperkaya dengan konvensi-konvensi ketatanegaraan, di antaranya adalah Pidato Kenegaraan Presiden pada setiap tanggal 16 Agustus.

Sejak tahun 1971 mulai diselenggarakan pemilihan umum secara berkala setiap lima tahun. Sementara itu partai-partai politik telah mengalami proses penyederhanaan, baik karena kesadaran mereka sendiri maupun karena didorong oleh anjuran pemerintah dan masyarakat umum serta hasil pemilihan umum 1971. Kini hanya terdapat dua partai politik dan satu Golongan Karya. Organisasi-organisasi masyarakat juga mulai ditata berdasarkan pengelompokan profesi dan fungsi. Hal ini terlaksana antara lain dalam penataan organisasi PGRI, FBSI, HKTI, HNSI, IDI, Peradin, KNPI, Kowani, OSIS, Pramuka dan AMPI. Profesionalisasi dan fungsionalisasi ini diharapkan akan menjadi tulang punggung masyarakat yang membangun.

Penyederhanaan ini, bagaimanapun telah mendorong peningkatan efisiensi mekanisme musyawarah dalam lembaga perwakilan dan dalam masyarakat pada umumnya. Kehidupan demokrasi tampak semakin sehat. Dalam Orde Baru ini diperbolehkan perbedaan pendapat dan dianjurkannya kritik dan koreksi, tetapi harus disertai dengan tanggung jawab untuk menyelamatkan pembangunan, persatuan dan kesatuan bangsa. Kebebasan dan tanggung jawab yang merupakan unsur-unsur utama manusia merdeka, bangsa merdeka, inilah yang dibina di dalam Orde Baru. Walaupun demikian bukan berarti harus berkembang menjadi oposisi. Demokrasi Pancasila tidak mengenal adanya golongan oposisi, melainkan hanya mengenal musyawarah untuk mufakat. Demokrasi Pancasila bukan ditentukan oleh "kemenangan jumlah suara," bukan ditentukan oleh paksaan kekuatan, melainkan kebulatan mufakat yang dikedepankan sebagai hasil hikmat kebijaksanaan. Oleh karena itu pula Demokrasi Pancasila menolak adanya diktatur mayoritas ataupun diktatur minoritas.

Penataan struktur ini masih belum selesai. Pada tataran suprastruktur, penataan itu relatif berhasil. Kini dapat dikatakan bahwa aparaturnya praktis telah bebas dari penyelewengan ideologis dan dapat melakukan tugasnya dengan tenang, karena tidak terlibat lagi dalam pertentangan ideologi golongan sempit. Hal mana juga tercermin dalam kestabilan pemerintahan Orde Baru. Sedangkan pada tataran infrastruktur, tampaknya penerimaan

ideologi Pancasila, masih tetap membuka kemungkinan bagi pengembangan ideologi-ideologi golongan. Hal ini menyebabkan kehidupan politik dalam masyarakat, masih tetap ditandai oleh sikap ambivalen terhadap Pancasila. Oleh karena itu sambil melanjutkan penataan struktur politik, juga perlu digarap kulturnya yaitu: ideologi Pancasila.

Sosialisasi ideologi Pancasila sebenarnya telah dimulai sejak awal Orde Baru, walaupun dosis perhatian pada bidang ini agak kurang menonjol dibandingkan dengan aspek struktur. Sosialisasi ini dilakukan secara serempak terutama melalui media pendidikan (Pendidikan Moral Pancasila), media komunikasi massa dan kegiatan penerangan. Akan tetapi penggarapan yang dilakukan secara lebih intensif dan ekstensif baru dimulai sejak tahun 1978 dengan keluarnya Ketetapan MPR-RI No. II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Presiden ditugaskan oleh MPR untuk melaksanakan Ketetapan itu, sehingga terwujudlah kegiatan penataran P4 yang dilaksanakan secara teratur dan terus-menerus pada berbagai lapisan masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintahan.

Penataran P4 merupakan langkah konkrit untuk meningkatkan efektivitas penghayatan dan pengamalan Pancasila, sekaligus meningkatkan pendidikan politik sehingga rakyat semakin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang bebas dan terarah kepada pelaksanaan P4, UUD 1945 dan GBHN. Apabila mekanisme pelaksanaannya disempurnakan terus-menerus, maka segala pikiran, perasaan dan kritik yang berkembang di dalam penataran-penataran itu dapat tersalur secara baik, demi semakin meningkatnya bobot penghayatan dan pengamalan Pancasila. Memang belum ada tolok ukur yang obyektif untuk menilai dampak penataran selama ini. Walaupun demikian Presiden Soeharto meyakinkan bahwa terdapat tanda-tanda yang secara umum menunjukkan Pancasila telah mengakar lebih luas, masyarakat menjadi lebih sadar, lebih jujur dan lebih yakin terhadap Pancasila. Sangat terasa bahwa Ketetapan MPR mengenai P4 telah mendatangkan perubahan-perubahan besar dalam suasana dan semangat kehidupan bermasyarakat dan bernegara. P4 ini merupakan babak baru dalam usaha kita semua untuk mewujudkan dan melestarikan Pancasila.¹

Akan tetapi hambatan-hambatan masih tetap menghadang, yang sebenarnya berakar pada sikap ambivalen sebagian anggota masyarakat terhadap Pancasila. Mereka ini pada umumnya tergolong masyarakat yang sadar politik dan sikapnya terhadap Pancasila dapat dikategorikan menurut pola-pola berikut: *Pertama*, ideologi Pancasila dianggap sekedar wadah atau alat pemer-

¹Lihat pidato pertanggungjawaban Presiden Soeharto di depan Sidang Umum MPR-RI tanggal 1 Maret 1983.

ideologi Pancasila hanya diterima secara taktis, tetapi secara prinsipial dianggap sebagai ancaman yang harus diganti dengan ideologi golongannya sendiri, bagaimanapun caranya. Yang mengikuti pola pertama dan kedua menghendaki supaya ideologi Pancasila tetap saja seperti sediakala, kabur, umum, tidak jelas dan karenanya tidak berfungsi. Sehingga dengan demikian terbuka peluang untuk mengisinya dan sekaligus menggantikannya. Dalam sejarah tampak bahwa kedua pola ini hanya mempunyai perbedaan gradual yang taktis, karena secara prinsipial keduanya tidak menghendaki Pancasila menjadi ideologi nasional, bangsa dan negara RI.¹

Oleh karena itu kini pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menjadikan Pancasila satu-satunya asas bagi setiap organisasi politik maupun organisasi masyarakat. Dengan demikian hanya Pancasila yang menjadi pedoman, kriteria dan ukuran bagi setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keragaman organisasi tetap dipelihara, tetapi keragaman dalam program, bukan keragaman dalam asas kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan. Dengan keragaman program, masing-masing organisasi dapat berbuat lebih efektif bagi rakyat. Jadi setiap organisasi menjadi terbuka kepada siapa saja yang berminat terhadap program-program yang ditawarkan, tanpa pembedaan agama, golongan, ras ataupun aliran sempit lainnya, sesuai dengan konsep kebangsaan yang kita anut.

Berbagai hal itu diharapkan dapat dicapai dengan diajukannya paket Lima RUU pada tanggal 23 Juni 1984 untuk dibahas di DPR.² Apabila kelima RUU itu dapat segera disahkan menjadi Undang-Undang, maka terbukalah suatu lembaran sejarah baru dalam pembangunan politik kita. Yaitu sejarah baru dari bagian proses pembaharuan struktur dan kultur politik nasional berdasarkan Pancasila. Penataan struktur politik yang dituntaskan serta dengan pengembangan kultur politik berdasarkan Pancasila yang diterima menjadi satu-satunya asas bagi semua organisasi politik maupun kemasyarakatan. Dengan demikian dialektika struktur dan kultur politik menemukan keseimbangan baru, suatu sintesa. Sintesa yang kreatif, karena kebhinnekaan justru akan dipacu untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara. Bagi kita demokrasi bukan oposisi, melainkan persatuan dan kebersamaan.

¹Lihat Rufinus Lahur, "Masalah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4): Ditinjau dari Segi Masyarakat," *Analisa*, CSIS: Tahun X, No. 11, Nopember 1981, hal. 965.

²Paket Lima RUU itu masing-masing adalah: RUU Mengenai Perubahan Undang-Undang Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD; RUU Tentang Pemilihan Umum; RUU Tentang Partai Politik dan Golongan Karya; RUU Tentang Referendum dan RUU Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

PENUTUP

Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi tiap organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan merupakan bagian dari pembangunan politik yang sifatnya kultural. Politik adalah bagian dari kebudayaan dan kita semua adalah bagian dari satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa dan satu kebudayaan. Dengan demikian pembangunan politik ini memang merupakan proses sejarah yang tetap menjamin kontinuitas dan konsistensi cita-cita perjuangan bangsa. Cita-cita perjuangan yang telah dikumandangkan melalui Sumpah Pemuda 1928, kemudian memperoleh bentuknya di dalam Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila pada tanggal 17 Agustus 1945, kini Orde Baru berjuang mengisi cita-cita kemerdekaan mewujudkan Negara Pancasila, membangun masyarakat Pancasila.

Dengan Pancasila sebagai satu-satunya asas, Orde Baru dapat merampungkan proses kerangka landasan penataan struktur maupun kultur politik nasional. Sebab asas tunggal inilah yang dapat menjamin pertumbuhan struktur dan kultur politik menjadi sehat dan kuat. Dengan asas tunggal itu, setiap warga negara, setiap organisasi akan berbicara dalam kerangka acuan yang sama, sehingga komunikasi dan ko-operasi yang sesungguhnya dapat terjadi. Walaupun demikian bukan berarti kebhinnekaan dalam masyarakat kita dimatikan. Kebhinnekaan tetap dijamin sejauh kebhinnekaan itu tidak merusak ketunggalikaan.¹ Maka determinisme kebhinnekaan yang berdasarkan pada ideologi golongan, agama, suku ataupun ras, harus ditanggalkan, karena telah terbukti senantiasa merongrong ketunggalikaan, memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa, serta terlepas dari Pancasila. Dalam kerangka acuan itu serta dengan pendekatan integralistik masyarakat didorong untuk mewujudkan kebhinnekaan di dalam program, berdasarkan profesi dan fungsi masing-masing organisasi, kebhinnekaan yang ditumbuhkan untuk membangun dan memperkaya masyarakat Indonesia: masyarakat Pancasila.

Sudah jelas, bahwa tuntutan masa sekarang ini adalah pengelompokan setiap kekuatan sosial dalam masyarakat ke dalam pengelompokan profesi dan fungsi. Untuk masa kini profesionalisasi dan fungsionalisasi adalah jawaban yang paling tepat dan merupakan manifestasi tanggung jawab anggota masyarakat yang sadar akan partisipasinya dalam pembangunan

¹Aspek kebhinnekaan hanya berlaku bagi yang bersangkutan saja, dan tidak dapat diterapkan di luar itu, misalnya saja agama. Organisasi kemasyarakatan yang dibentuk atas dasar persamaan agama dimungkinkan. Tetapi keagamaan itu hanya berlaku bagi penganut dalam organisasi tersebut, sehingga tidak dapat diterapkan ke luar, sebagai asas kebangsaan, kenegaraan, kemasyarakatan untuk seluruh warga negara dan segenap bangsa. Kalau konteksnya adalah seluruh bangsa, maka ketunggalikaan yang menjamin kebhinnekaan itu adalah Pancasila.

masyarakat. Akan tetapi bukan profesionalisasi dan fungsionalisasi yang terkurung dan mengurung diri dalam kesempitan-kesempitan profesi dan fungsi masing-masing, melainkan kelompok-kelompok profesi dan fungsi yang senantiasa terbuka untuk mengadakan dialog-dialog serius, sehingga dapat saling mengisi dan memudahkan mencari pemecahan masalah bangsa dan negara secara bersama-sama. Melalui wadah-wadah ini kegiatan dan potensi besar yang ada pada masyarakat tidak akan tersia-siakan, tidak akan dibuang percuma, dan dalam perkembangan sejarah bangsa dan negara akan tercatat sebagai tindakan yang benar-benar didasarkan atas tanggung jawab.

Inilah kekuatan-kekuatan sosial yang perlu ditumbuhkan dalam seluruh lapisan masyarakat bangsa. Yaitu kekuatan-kekuatan yang selalu terbuka untuk bersatu, terbuka untuk maju, terbuka untuk pembaharuan, terbuka untuk kerja dan pembangunan.¹ Kekuatan-kekuatan sosial yang titik pangkal dan tujuannya adalah perkembangan dan pembangunan sejarah bangsa dan negara kita. Kekuatan-kekuatan sosial yang mampu mengembangkan negara bangsa dengan pembangunan-pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Melalui penataan organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti ini, maka setiap warga negara, setiap manusia Indonesia dapat mengembangkan hidupnya bersama dengan semua sesamanya, tanpa hambatan keterutupan dan kepicikan. Melalui penataan seperti ini, dialektika struktur dan kultur politik Indonesia menemukan momentum baru, yaitu dinamika dan keseimbangan baru. Dengan demikian dapat diharapkan pada akhir Pelita IV nanti, terciptanya kerangka landasan di bidang politik bagi seluruh bangsa Indonesia untuk dapat tinggal landas, mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

¹Untuk ini Golkar telah dan akan menunaikan tugas sejarah yang amat penting.